

QUO VADIS LISTRIK PERDESAAN?



STRATEGIC PARTNERSHIP FOR GREEN AND INCLUSIVE ENERGY

Oktober 2017

Latar Belakang

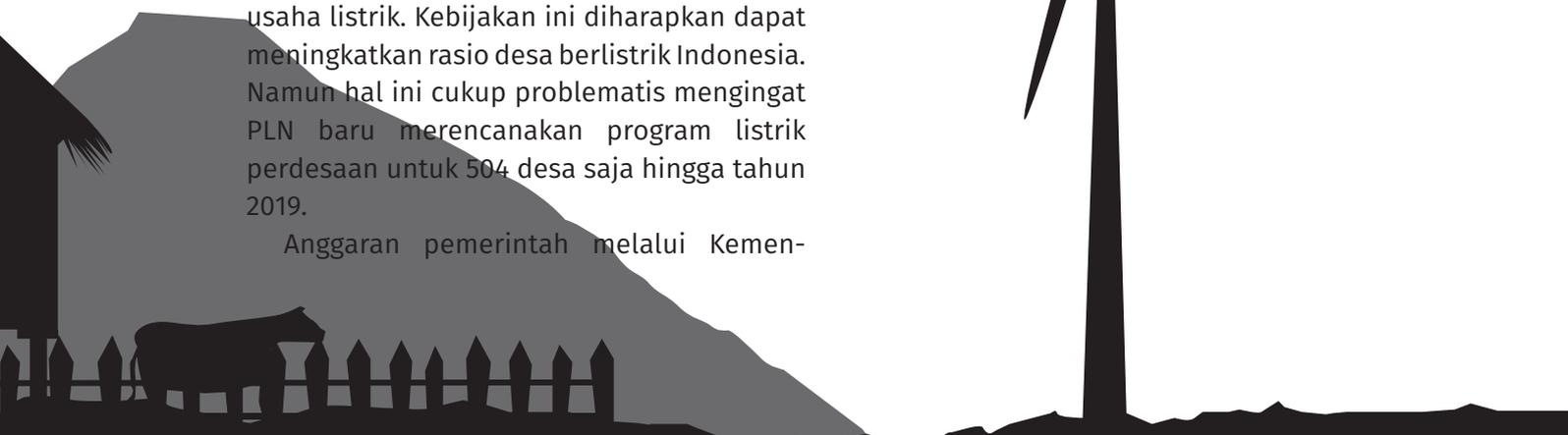
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas memerlukan ketersediaan energi yang handal dan merata, termasuk listrik. Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan pemenuhan energi untuk semua warganya. Di tahun 2017, masih terdapat 5 juta rumah tangga atau sekitar 20 juta penduduk Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik. Dari angka tersebut, sebagian besar berada di Indonesia bagian timur dan di daerah perdesaan. Hingga saat ini, dari total 82.190 desa di Indonesia, baru sekitar 97% yang sudah mendapatkan akses listrik. Menurut data Badan Pusat Statistik, masih ada 2.519 desa yang masih gelap total.

Keberadaan energi sangat penting bagi daerah perdesaan dalam kaitannya dengan kemajuan dan peningkatan taraf hidup. Dengan adanya listrik, masyarakat dapat menggunakan penerangan untuk berbagai aktivitas, termasuk aktivitas usaha rumah tangga. Pemerintah dalam upayanya untuk mempercepat program elektrifikasi daerah-daerah terpencil di Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan yang dituangkan dalam Permen ESDM No. 38/2016 mengenai Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil. Aturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum pada Badan Usaha Milik Daerah, swasta, dan koperasi untuk bisa mengelola usaha listrik. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan rasio desa berlistrik Indonesia. Namun hal ini cukup problematis mengingat PLN baru merencanakan program listrik perdesaan untuk 504 desa saja hingga tahun 2019.

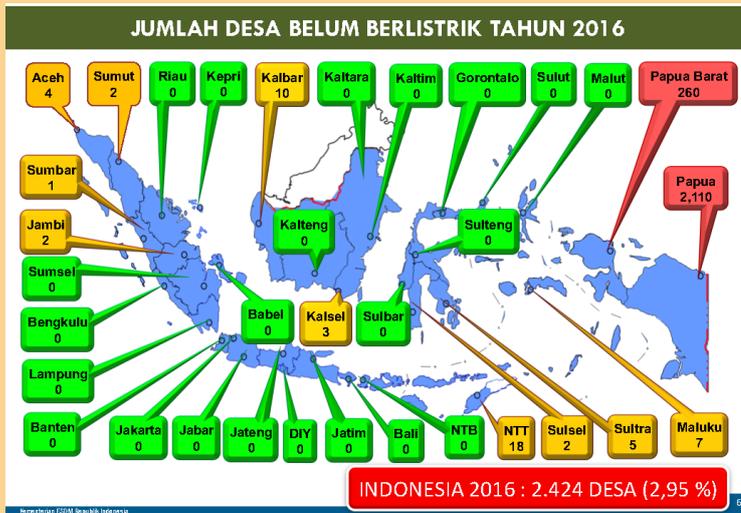
Anggaran pemerintah melalui Kement-

terian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk program listrik perdesaan sendiri masih terbatas. Di tahun 2015, pemerintah menyediakan anggaran Rp 3,1 triliun, namun jumlahnya menurun di tahun 2016, di mana hanya Rp 1 triliun yang diberikan untuk program tersebut. Sumber pendanaan lain adalah Dana Desa. Pemerintahan Jokowi-JK memiliki komitmen pemberian Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, termasuk di antaranya infrastruktur pembangkit listrik. Skema pendanaan ini diharapkan dapat membantu pembangunan infrastruktur pembangkit listrik bagi desa yang membutuhkan pembangkit.

Selain APBN melalui Kementerian ESDM dan Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan sumber pendanaan untuk percepatan program listrik perdesaan yang dapat dimanfaatkan. Pembiayaan listrik perdesaan dengan DAK dapat mendorong percepatan desentralisasi penyediaan energi terutama di daerah-daerah yang belum menjadi prioritas pemerintah pusat atau PLN. Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan di daerah menggunakan DAK memiliki kelemahan, yaitu tenaga ahli yang kompeten, kemampuan *site assessment* dan *technical*



Gambar 2. Jumlah desa belum berlistrik di Indonesia dan sebarannya (Ditjen Gatrik KESDM, 2017)



Jika dilihat berdasarkan lokus desa, terdapat 2.424 desa yang sama sekali belum berlistriki. Sebagian besar dari desa ini berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Perhitungan desa berlistrik ini juga perlu ditinjau, mengingat sebuah desa disebut berlistrik apabila ada satu atau lebih rumah yang terjangkau jaringan listrik. Dengan kondisi desa yang terdiri dari beberapa dusun dan seringkali berjarak jauh satu dengan yang lainnya, jaringan listrik bisa saja menjangkau satu dusun namun tidak dusun yang lain.

P2

Tantangan apa yang dihadapi pemerintah untuk melistriki desa?

Kondisi geografis Indonesia adalah tantangan utama pemerintah untuk melistriki desa, selain pasokan yang perlu ditambah. Di Pulau Jawa saja, ada banyak desa yang medannya sulit untuk dijangkau. Hal ini menyebabkan jaringan PLN sulit untuk masuk ke desa tersebut. Memperluas jaringan PLN ke desa-desa yang lokasinya jauh dari jaringan distribusi terdekat dinilai tidak masuk dalam skala keekonomian PLN karena memerlukan biaya yang mahal dan waktu pengerjaan yang tidak sebentar. Penyediaan pasokan juga memerlukan pembangunan pembangkit. Hal ini sering terkendala pendanaan, tempat, hingga suplai bahan bakar yang masih mengandalkan bahan bakar fosil. Untuk beberapa daerah yang sulit dijangkau, PLN dan pemerintah menyediakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Pembangkit listrik ini memiliki ukuran yang beragam dan dapat dipindahkan, namun

masih menggunakan bahan bakar fosil, sangat bergantung pada pasokan bahan bakar, serta memerlukan *maintenance* secara berkala. Untuk desa-desa yang lokasinya jauh dari perkotaan dan tidak memiliki tenaga teknis untuk *maintenance*, diperlukan waktu cukup lama untuk memperbaiki PLTD tersebut, dan sepanjang itu desa-desa yang bergantung pada PLTD tidak memiliki listrik.

Tantangan ini dapat dijawab dengan energi terbarukan. Potensi energi terbarukan setempat, seperti sinar matahari, angin, atau air, dapat menjadi sumber energi yang digunakan untuk pembangkit listrik. Dengan menggunakan pendekatan desentralisasi energi, ekspansi jaringan bukan lagi menjadi titik berat dan mendorong pemberdayaan masyarakat untuk pembangkitan listrik dapat dilakukan. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil dapat dialihkan dengan penggunaan energi yang lebih bersih.

P3

Bagaimana pemerintah mengatasi tantangan tersebut?

Untuk menyediakan listrik dan penerangan untuk desa yang sulit dijangkau jaringan PLN, Kementerian ESDM mendistribusikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Program ini diatur dalam Perpres No. 47 Tahun 2017 dan tata cara penyediaannya diatur dalam Perpres No. 33 Tahun 2017. Sebagai program pra-elektifikasi, LTSHE ini bertujuan untuk menerangi desa-desa yang masih gelap sebelum jaringan PLN masuk.

Program lain berkaitan listrik perdesaan yang dimiliki Kementerian ESDM adalah perluasan jaringan PLN yang diatur oleh RUPTL dengan nilai anggaran program sebesar Rp 3,1 triliun. Di dalamnya terdapat biaya penyambungan senilai 2,1-2,5 juta rupiah/

sambungan yang dibayar oleh pelanggan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong sektor swasta, baik dalam dan luar negeri, untuk berkontribusi dalam melistriki desa. Melalui beberapa peraturan menteri, investor swasta dapat masuk untuk menerangi desa-desa yang jauh lokasinya atau sulit terjangkau jaringan PLN. Menurut data Kementerian ESDM, investor dari luar negeri lebih banyak tertarik berinvestasi di Indonesia bagian Timur seperti Papua karena pertimbangan harga jual listrik yang lebih tinggi dibanding Indonesia bagian barat. Dengan kuasa usahanya hingga 20-25 tahun, pemerintah mendorong investor dari luar negeri untuk bergabung dengan BUMD pemerintah setempat.

P4

Bagaimana perencanaan jangka panjang pemerintah dalam upaya melistriki Indonesia?

Arah kerja pemerintah saat ini beralih dari *money follows function* menjadi *money follows program*. Dengan pendekatan ini, kegiatan dan program yang mendukung pencapaian atau target-target RKT (Rencana Kerja Tahunan) akan dikategorikan sebagai proyek prioritas nasional. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang bertujuan memenuhi target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dikategorikan sebagai prioritas bidang, termasuk peningkatan rasio elektrifikasi dan pembangunan pembangkit.

Secara garis besar, arah kebijakan ekonomi makro 2018 meliputi tiga hal: menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4-6,1%, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6-7% setahun, Indonesia memerlukan penambahan pembangkit listrik sedikitnya 7.000 MW dalam setahun. Karenanya, pemerintah menuangkan Program Nasional 35.000 MW dalam dokumen RPJMN 2015 - 2019. Untuk realisasinya, pemerintah menerapkan beberapa

strategi pelaksanaan, yaitu:

- Mempercepat ketersediaan lahan
- Menciptakan iklim investasi yang mendukung bagi pihak swasta dengan penetapan harga jual listrik dan percepatan proses pengadaan
- Penerapan uji tuntas (*due diligence*) dan pengendalian melalui *project*

management office

- Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait

Dalam rencana pembangunan jangka panjang ini, fokus pada peningkatan rasio elektrifikasi, juga untuk listrik perdesaan, diamanatkan pada Kementerian ESDM dan PLN.

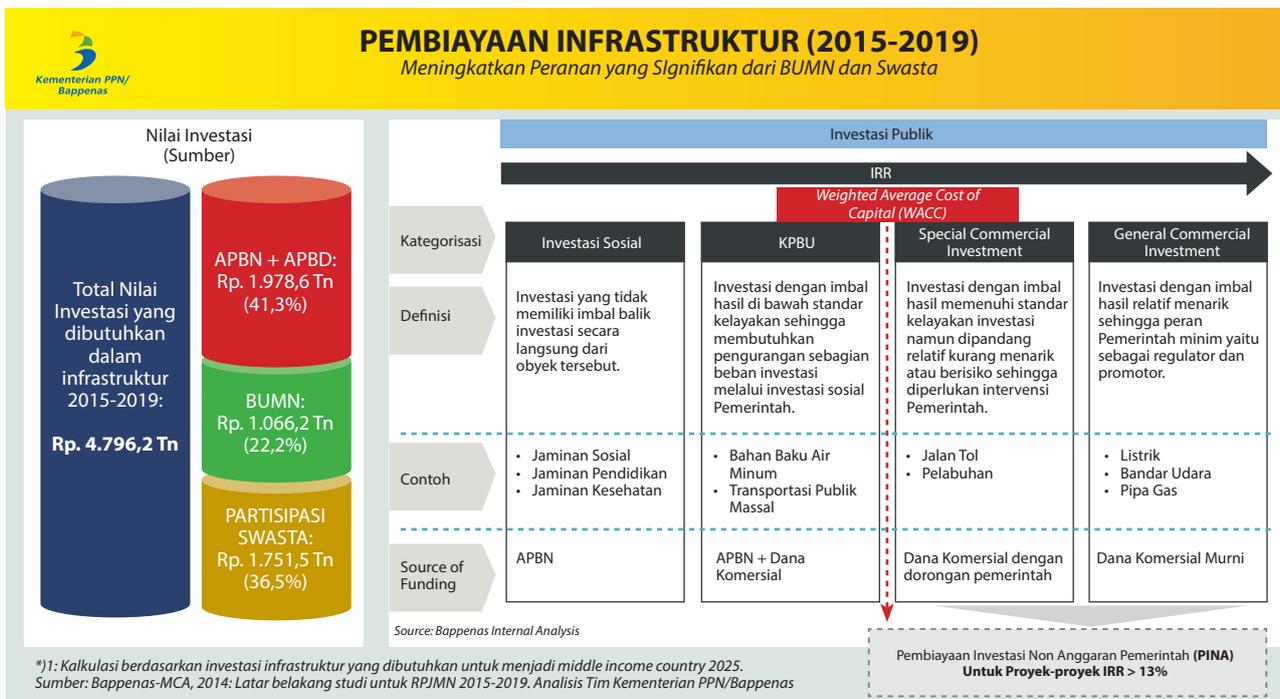
P5

Apa saja sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk program kelistrikan?

Berkaitan dengan pendanaan, skema pembiayaan pembangunan dan infrastruktur dirancang dengan meningkatkan peranan yang signifikan dari

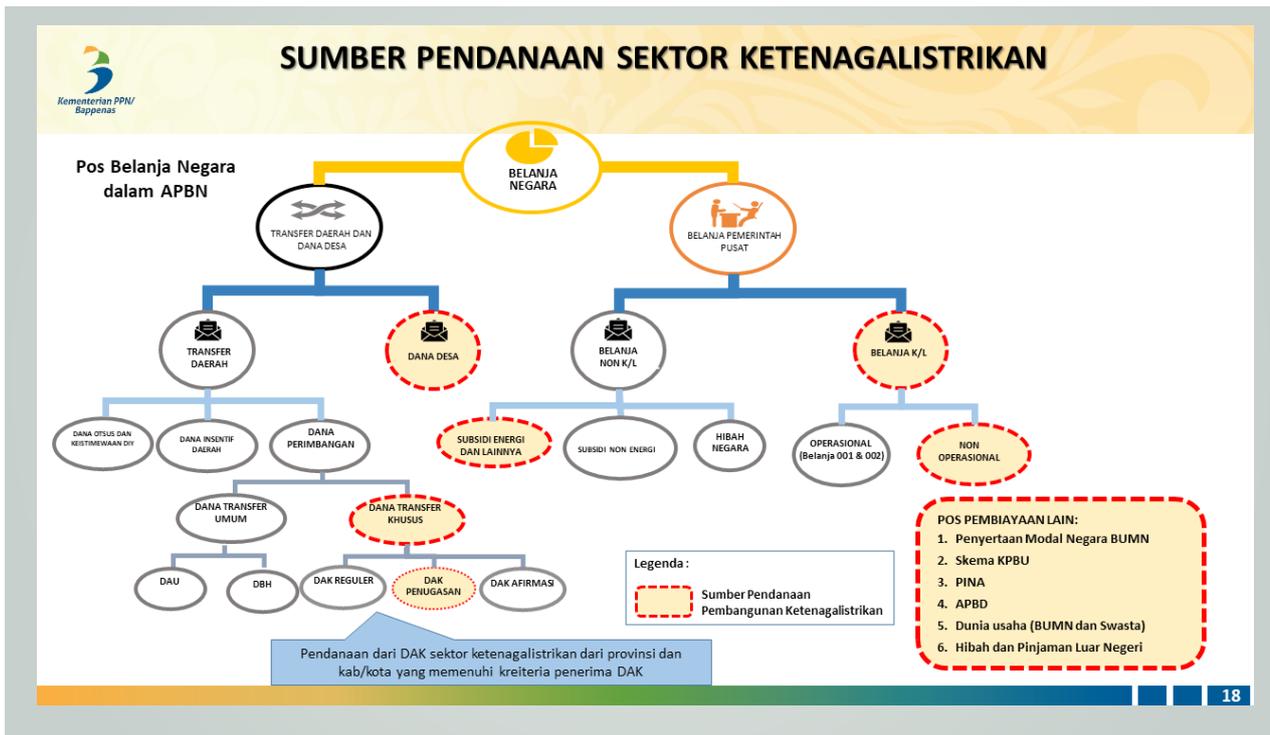
BUMN dan pihak swasta. Peran pihak swasta terbilang penting untuk tercapainya target pembangunan karena dana APBN dan APBD yang terbatas.

Gambar 3. Skema pembiayaan infrastruktur untuk tahun 2015 - 2019 (Kementerian PPN/Bappenas, 2017)



*J1: Kalkulasi berdasarkan investasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjadi middle income country 2025.
Sumber: Bappenas-MCA, 2014: Latar belakang studi untuk RPJMN 2015-2019. Analisis Tim Kementerian PPN/Bappenas

Gambar 4. Skema pendanaan sektor ketenagalistrikan (Kementerian PPN/Bappenas, 2017)



Untuk pembiayaan infrastruktur, skema pendanaan yang melibatkan swasta meliputi KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), *special commercial investment*, dan *general commercial investment*. Pendanaan *multistakeholder* ini juga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Terkait listrik dan listrik perdesaan, terdapat beberapa pos pendanaan dalam APBN, antara lain: Dana Desa, anggaran belanja kementerian/lembaga, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Khusus yang dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur kelistrikan tingkat desa atau

komunitas, namun jumlahnya terbatas. Untuk tahun 2016-2017, jumlahnya berkisar 500 milyar rupiah dengan pembagian untuk seluruh Indonesia dan memiliki menu pilihan PLTS, PLTMH, dan instalasi biogas skala rumah tangga. Tantangan terkait DAK adalah proses pengajuannya yang melalui pemerintah daerah. Salah satu syarat mendapatkan alokasi DAK adalah pengajuan dari pemerintah daerah. Tanpa proposal pengajuan ini, meski suatu daerah membutuhkan listrik, DAK tidak bisa diberikan. Selain itu, keberlanjutan program merupakan tantangan lain. Banyak aset yang mangkrak karena warga atau pemerintah daerah tidak bisa mengoperasikan atau merawat infrastruktur yang sudah dibangun.

PLN memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), di mana di dalamnya juga terdapat target untuk listrik perdesaan. Salah satu tantangan yang dihadapi PLN beberapa tahun ke belakang untuk program listrik perdesaan adalah larangan pembangunan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) oleh manajemen PLN dan pemerintah. Larangan ini berlaku hingga tahun 2015. Selain itu, pasokan minyak diesel untuk generator pembangkit listrik juga terkendala kuota dari Pertamina. Sebagai badan usaha pemerintah, PLN tidak diizinkan untuk membeli pasokan dari luar negeri.

Dengan pendekatan pembangkitan terpusat (*centralized generation*) dan *demand-driven* (pertimbangan permintaan listrik), pembangunan infrastruktur kelistrikan di desa dianggap tidak masuk skala keekonomian PLN karena lokasi yang sulit dijangkau dan persebaran penduduk yang tidak merata. Pembangkit tersebar dan *mini-grid* dengan pemanfaatan energi terbarukan dapat menjadi salah satu solusi penyediaan listrik desa.

Untuk pengembangan pembangkit energi terbarukan, tantangan harga pembangkitan listrik yang masih tinggi menjadi pertimbangan tersendiri untuk PLN. Hingga saat ini, fokus PLN untuk listrik perdesaan adalah dengan pengembangan transmisi dan distribusi serta penyediaan pembangkit listrik tenaga diesel.

Pemerintah menilai penyesuaian tarif listrik ini adalah langkah yang baik karena selama ini subsidi yang diberikan dianggap salah sasaran. Dengan pencabutan subsidi ini, diharapkan anggaran subsidi listrik di tahun 2017 bisa ditekan menjadi Rp 45 triliun, dari sebelumnya Rp 60,44 triliun di tahun 2016. Dana yang tersedia dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur atau untuk listrik perdesaan dengan harapan di tahun 2019 Indonesia sudah terang seluruhnya. Kementerian ESDM juga membuka layanan pengaduan untuk mengantisipasi kebijakan ini, dan pelaporan yang masuk akan ditindaklanjuti untuk diproses dan dikembalikan subsidi jika memang pelapor masih tergolong rumah tangga yang memerlukan subsidi.



Hingga tahun 2017, perluasan jaringan PLN sudah mulai terfokus dan menyasar daerah luar pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara. Hingga tahun 2019, PLN juga memasukkan rencana melistriki 2.500 desa yang masih gelap.

Secara garis besar rencana PLN untuk menerangi 2.500 desa adalah dengan pengembangan paralel segi pembangkitan, transmisi, maupun distribusi. Namun, pengembangan jaringan transmisi masih banyak terkendala pembebasan lahan. Dari segi jenis



erariau.com

pembangkit, PLN juga tidak merinci lebih jauh terkait pilihan untuk menggunakan energi terbarukan.

Tabel 1. Rencana PLN untuk listrik perdesaan, terutama desa yang masih gelap total (PLN, 2017)

Provinsi	2017	2018	2019	TOTAL
Aceh	3	1		4
Jambi	2			2
Sumatera Utara	2			2
Sumatera Barat	1			1
Kalimantan Selatan		2	1	3
Kalimantan Barat		8	1	9
Maluku		3	2	5
NTT	2	9	7	18
Papua	40	758	1312	2110
Papua Barat	36	158	71	260
Sulawesi Selatan		2		2
Sulawesi Tenggara	2	2	1	5
TOTAL	88	938	1395	

Dari 2510 desa, 85 desa sudah berlistrik pada tahun 2016, 2 desa di Maluku akan dilistriki di 2020 di Kep. Aru, 1 desa di Kalbar; Sabhang Landan, ternyata adalah Dusun dan 1 desa di Kaltara; Riam Tubu sudah dilistriki swadaya.

Menurut Kiswanto dari PLN, pengembangan energi terbarukan untuk listrik telah menjadi prioritas PLN. Hal ini juga mengacu pada batasan dari pemerintah bahwa porsi pembangkitan dari batu bara maksimal 50%. Namun PLN juga mempertimbangkan karakter energi terbarukan yang *intermittent* (tidak terus menerus bisa menghasilkan listrik) sehingga biaya *balancing power* harus disertakan dalam perhitungan biaya pembangkitan. Di sisi lain, masyarakat menginginkan karakteristik listrik yang andal dan kontinyu dengan harga yang murah.

PLN juga akan memanfaatkan sumber energi terbarukan dari jenis energi aliran dan terjunan air, energi panas bumi (termasuk skala kecil/modular), biofuel, energi angin, energi sinar matahari, biomassa dan sampah. Menurut Rencana Umum Penyediaan Tenaga

Listrik (RUPTL) PLN 2017 – 2025, rencana pemanfaatan energi terbarukan masih menitikberatkan pada pembangkit-pembangkit skala besar, yang didominasi oleh panas bumi dan air.

Harga Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) listrik dari energi terbarukan hingga saat ini dinilai PLN masih cukup tinggi, sehingga rencana pengembangannya pun difokuskan pada pembangkit skala besar. Kendati demikian, pengembangan skala besar juga harus disertai dengan pengembangan transmisi dan sambungan ke jaringan yang memerlukan perencanaan matang dan pendanaan yang tidak sedikit. Selain itu, pembangkit listrik skala komunitas dengan jaringan mini atau mikro dapat dibangun untuk desa-desa yang sulit dijangkau dan memiliki jumlah penduduk tersebar.

Tabel 2. Rencana pembangunan pembangkit EBT (RUPTL PLN 2017 – 2025)

No	Pembangkit - EBT	Kapasitas	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah
1	PLTP	MW	305	165	315	186	365	790	345	1.015	2.510	294	6.290
2	PLTA	MW	18	87	323	154	1.800	1.701	2.035	1.697	3.675	1.000	12.488
3	PLTMH	MW	68	112	168	198	388	326	178	30	144	81	1.694
4	PLT Surya	MWp	55	12	20	-	-	-	-	-	-	-	87
5	PLT Bayu	MW	-	-	235	170	60	-	-	-	-	-	465
6	PLT Biomass/Sampah	MW	186	78	225	10	11	6	10	10	-	-	536
7	PLT Kelautan	MW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PLT Bio-Fuel	Ribu Kilo Liter	780	1.129	809	661	563	519	519	525	531	536	6.572
	Jumlah	MW	632	454	1.286	718	2.624	2.822	2.567	2.752	6.329	1.375	21.560

Dalam diskusi ini muncul pembahasan mengenai *top down approach vs bottom-up approach*. Perwakilan organisasi masyarakat sipil dari Kupang yang hadir memberikan saran kepada pemerintah agar

pembangkitan listrik juga memperhatikan kearifan dan pola perilaku lokal masyarakat. Menurutnya, pengembangan infrastruktur kelistrikan jangan hanya berhenti di perumahan, tapi juga ke wilayah-wilayah pertanian. Hal ini

berdasarkan pengamatan bahwa mayoritas penduduk perdesaan bekerja sebagai petani dengan usia yang sudah tua, sehingga mereka banyak menghabiskan waktu di wilayah pertanian dan bukan pemukiman.

Dengan kondisi Indonesia yang beragam, model penyediaan listrik yang terdesen-tralisasi dan memperhatikan aspek budaya setempat memang penting. Pendekatan jaringan bisa dilakukan untuk daerah yang bisa dijangkau dan memiliki jumlah penduduk atau aktivitas produktif yang cukup besar. Sementara itu untuk

desa-desa yang sulit dijangkau dan wilayah-wilayah dalam desa yang menjadi titik aktivitas, penggunaan energi terbarukan setempat akan membantu mereka untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dan mendorong kegiatan produktif.

Rachmat Mardiana menanggapi bahwa pengembangan infrastruktur memang seharusnya perpaduan antara pendekatan *top-down* dan partisipasi daerah. Menyinggung kembali mengenai Dana Alokasi Khusus, program tersebut baru bisa berjalan jika ada inisiatif pemerintah daerah.

P10

Apa rekomendasi IESR untuk percepatan program kelistrikan desa?

Tantangan untuk melistriki Indonesia juga mencakup melistriki daerah perdesaan. Masih ada ribuan desa di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik sama sekali atau secara penuh, terutama di Indonesia bagian Timur. Berikut adalah rekomendasi IESR untuk percepatan pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan:

1. Bappenas dan KESDM perlunya perencanaan penyediaan listrik yang terpusat dan terintegrasi sebagai rencana induk (*Master Plan*), yang dituangkan dalam perencanaan per pulau/provinsi. Pemanfaatan teknologi GIS dan peta digital dapat membantu perancangan solusi optimal untuk elektrifikasi perdesaan berdasarkan pilihan: perluasan jaringan, mini-grid dan *solar home system* (SHS). Rencana ini menjadi acuan bagi pelaksanaan pelistrikan desa oleh PLN, Pemerintah Daerah, dan investor swasta.
2. Pemerintah menyediakan pendanaan yang diperlukan untuk pembangunan listrik perdesaan. Salah satu cara dengan mengoptimalkan instrumen pendanaan yang saat ini sudah ada, dan mengalokasikan sesuai dengan jenis intervensi yang sesuai dengan wilayah perdesaan yang akan dilistriki, misalnya untuk solusi perluasan jaringan dilakukan melalui PLN, sementara solusi mini-grid dilakukan oleh Kementerian ESDM, dan solusi sistem berbasis individu, seperti *solar home system* (SHS) atau *pico-hydro* dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dan anggaran pemerintah provinsi. Penyesuaian terhadap regulasi yang terkait dengan ini perlu dilakukan segera.
3. Pemerintah pusat perlu memperkuat institusi dan sumber daya di tingkat provinsi untuk melakukan perencanaan proyek-proyek kelistrikan yang berkualitas. Pemerintah pusat dapat menyediakan perangkat perencanaan (*tools*) yang dapat dipakai Pemerintah Daerah.
4. Pemerintah perlu mendorong pihak swasta untuk berperan dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), *special commercial investment*, dan *general commercial investment*. Melalui beberapa peraturan menteri, investor swasta dapat masuk untuk menerangi desa-desa yang jauh lokasinya atau sulit terjangkau jaringan PLN. Dengan kuasa usahanya hingga 20-25 tahun, pemerintah juga dapat mendorong investor dari luar negeri untuk bergabung dengan BUMD pemerintah setempat.
5. Pemerintah perlu mendorong model penyediaan listrik yang terdesentralisasi melalui pemanfaatan potensi energi terbarukan yang tersedia lokal. Pemerintah dan PLN perlu mempertimbangkan pendekatan desentralisasi ini dan mengintegrasikannya dalam perencanaan penyediaan listrik nasional.

Tentang STRATEGIC PARTNERSHIP FOR GREEN AND INCLUSIVE ENERGY

Lebih dari satu milyar orang di seluruh dunia tidak memiliki akses yang dapat diandalkan pada energi yang bersih dan terjangkau. Pada awal tahun 2016, Hivos dengan Pemerintah Belanda meluncurkan *Strategic Partnership* untuk Energi Bersih dan Inklusif untuk turut serta berperan mengatasi tantangan tersebut. *Strategic Partnership* ini memiliki fokus pada lobi dan advokasi yang diharapkan dapat mempengaruhi debat secara politik dan publik mengenai isu energi, dengan tujuan akhir mendorong transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan lebih inklusif.

Untuk mendukung pencapaian target pemenuhan energi dan pengembangan energi bersih dan inklusif, dorongan dari pihak eksternal terutama organisasi masyarakat sipil (*civil society organizations/CSO*) baik yang bergerak di bidang energi maupun non energi, pihak swasta, dan kelompok pengguna energi terbilang penting. Dorongan publik adalah komponen penting untuk memenuhi kebutuhan energi bersih dan inklusif karena sektor energi cenderung memiliki nuansa politik yang kental dan menarik banyak kelompok kepentingan. Tanpa adanya pelibatan CSO dan publik dalam merumuskan kebijakan, target, dan prioritas pengembangan di sektor energi; juga melakukan pemantauan perkembangan dan kualitas regulasi yang ada, perencanaan di sektor energi serta penerapannya akan sulit untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. *Strategic Partnership* ini dibangun dengan berlandaskan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan penguatan kapasitas organisasi-organisasi tersebut untuk melakukan advokasi isu energi bersih dan inklusif secara efektif. Program ini mengedepankan kolaborasi dan akan berperan aktif mempengaruhi kebijakan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Di Indonesia, Hivos bermitra dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) yang mewakili CSO dengan fokus energi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mewakili kelompok konsumen, dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang mewakili kelompok perempuan.



Diproduksi oleh:

Institute for Essential Services Reform

IESR adalah sebuah lembaga pemikir unik yang menggabungkan kajian mendalam mengenai kebijakan, regulasi, dan aspek tekno-ekonomis di sistem energi dengan kegiatan advokasi yang kuat untuk mempengaruhi para pemangku kepentingan utama di Indonesia serta tingkat regional dan global.

IESR menghasilkan analisa berbasis fakta dan sains, bekerja sama dengan beragam pemangku kepentingan (pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil), dan memberikan pendampingan serta peningkatan kapasitas bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lain yang membutuhkan.

Jalan Tebet Barat Dalam VIII. No 20B
Jakarta Selatan, 12810
Indonesia

T. +62-21-22323069

F. +62-21-8317073